

ABSTRAK

Berangkat dari disahkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada tahun 2022 silam dan seiring peningkatan angka kasus korban kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya, menjadi penelitian yang menarik guna kontribusi dalam studi literatur tentang implementasi kebijakan kesetaraan gender. Dalam melaksanakan tugas memenuhi hak perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kepanjangan tangan, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada Pasal 76 ayat (3) UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus deskriptif. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik model Van Metter dan Van Horn dan teori resistensi yang dikembangkan oleh Mergaert dan Lombardo, sebagai alat analisis guna mengupas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang TPKS di Kota Tasikmalaya terimplementasi secara substansi hukumnya. Dari 11 tugas yang dimandatkan Pasal 76 ayat (3) UU TPKS, terdapat 4 tugas belum terimplementasi. Catatan terbesar dari implementasi UU TPKS di Kota Tasikmalaya adalah terbatasnya pengetahuan badan pelaksana terkait UU TPKS itu sendiri. Beberapa faktor penghambat lainnya meliputi belum adanya peraturan turunan, sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas di Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya. Kemudian, faktor politik sedikit banyaknya menjadi hambatan dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya. Terjadinya resistensi institusional eksplisit dan resistensi individu implisit dalam tubuh lembaga pemerintah kota dan juga DPRD Kota Tasikmalaya sebagai elit politik mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pencegahan kasus kekerasan seksual dan perlindungan korban.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022

ABSTRACT

With the enactment of Law No.12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (TPKS) in 2022 and the increasing number of cases of sexual violence victims in Tasikmalaya City, this is an interesting research to contribute to the literature study on the implementation of gender equality policies. In carrying out the task of fulfilling the rights to protect women and children from sexual violence, the Tasikmalaya City Government has an extension, namely the Tasikmalaya City Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Office (PPKBP3A). This research aims to look at the implementation process of the Sexual Violence Crime Law in Tasikmalaya City, focusing on Article 76 paragraph (3) of the TPKS Law. This research uses qualitative research methods and a descriptive case study approach. Researchers used Van Metter and Van Horn's theory of public policy implementation and resistance theory developed by Mergaert and Lombardo, as analytical tools to explore primary and secondary data obtained through interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of the TPKS Law in Tasikmalaya City was implemented in its legal substance. Of the 11 tasks mandated by Article 76 paragraph (3) of the TPKS Law, 4 have not been implemented. The biggest note of the implementation of the TPKS Law in Tasikmalaya City is the limited knowledge of the implementing agency regarding the TPKS Law itself. Some other inhibiting factors include the absence of derivative regulations, human resources, budget and facilities at the PPKBP3A Office of Tasikmalaya City. Then, political factors are more or less an obstacle in handling sexual violence in Tasikmalaya City. The occurrence of explicit institutional resistance and implicit individual resistance within the city government institutions and also the Tasikmalaya City DPRD as a political elite resulted in a lack of effectiveness in preventing sexual violence cases and protecting victims.

Keywords: *Policy Implementation, Sexual Violence, Law No. 12 Year 2022*